

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAN KPK DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

IMMA MULTAZAM

NIM: 10300112029

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imma Multazam
NIM : 10300112029
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 6 April 1994
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 8
Judul : Peran Penyidik Kepolisian dan KPK dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dalam Hukum Nasional Dan
Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 31 Agustus 2017

Penyusun,



IMMA MULTAZAM

NIM: 10300112029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Peran Penvidik Kepolisian dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam" yang disusun oleh Imma Multazam, NIM: 10300112029, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017M, bertepatan dengan 9 Dzul Hijjah 1438H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

Makassar, 31 Agustus 2017M.
9 Dzul Hijjah 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

| | |
|---------------|-----------------------------------------|
| Ketua | : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag |
| Sekretaris | : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag |
| Munaqisy I | : Dr. Hamzah Hasan M.HI |
| Munaqisy II | : Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI |
| Pembimbing I | : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag |
| Pembimbing II | : Dr. Hamsir, M.Hum |

Diketahui oleh:

Dean Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

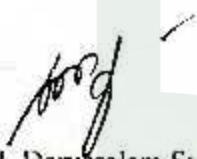
Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Imma Multazam**, NIM: 10300112029, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, **"Peran Penyidik Kepolisian dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan ke ujian munaqasyah.

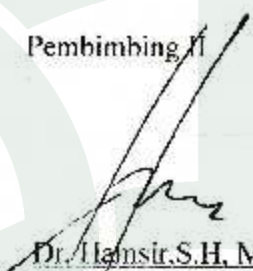
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 21 Agustus 2017

Pembimbing I

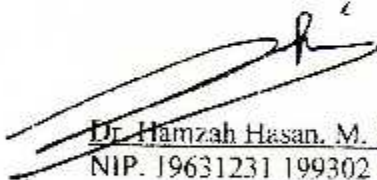
Pembimbing II

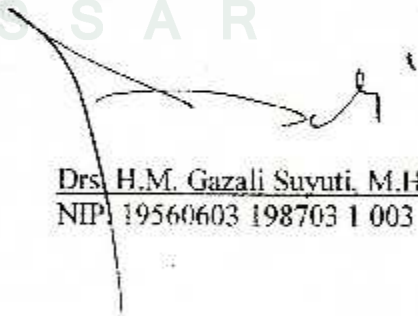

Prof. Dr. H. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003


Dr. Hamsir S.H, M.Hum
NIP. 19610404 199303 1 005

Penguji I

Penguji II


Dr. Hamzah Hasan, M. Hi
NIP. 19631231 199302 1 003


Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.Hi
NIP. 19560603 198703 1 003

KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

AssalamuAlaikumWr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk *Nabiullah* Muhammad saw. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “Peran Penyidik Kepolisian dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam”.

Kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak, baik dalam sugesti dan motivasi moril maupun materil. Karena itu penyusun berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penyusun Ibunda tersayang Nurnani yang selalu membantu dan

menyemangati saya melalui pesan-pesan dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau dan ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda H. Amiruddin Pase, SE yang selalu tiada henti memberikan semangat, motivasi, bantuan moril dan materil serta do'a restu bagi penulis dari sejak awal melaksanakan studi sampai selesai.

Secara berturut-turut penulis menyampaikanterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawanya.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Ibu Dr. Kurniati, M.Ag. Selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta stafnya atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Hamsir, M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.HI selaku Munaqisy I dan Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI selaku Munaqisy II yang telah memberikan arahan, kritik dan saran yang konstruktif kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
8. Suami tersayang Abdul Hafid yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun.
9. Sahabat KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 51 dari Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, sukses untuk kita semua kawan.
10. Saudara-saudariku Nur Mahadhir Amiruddin, Zamridha Amiruddin S.T, AR. Azlansyah Amiruddin, Oen Aziz Amiruddin, Aminah Ratu Balkis dan AR. Dewa Pase yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku Fitriani S.Hi, Putriyanti S.H, Siti Nur Islamhya S.H, Anugra Rahma, Ertina Syahrani S.Hi, Radiaty Kadir S.Hi, Ummul Khairi Masdar S.Hi, Husna S.Hi, Resky Purnamasari, dan Ansar Salim S.H yang senantiasa menemani dan menjadi saudara selama kami bersama.
12. Terimah kasih untuk kakak Syamsi Machmoed yang tak pernah bosan memberikan arahan kepada saya dan selalu memberikan dukungan.
13. Seluruh mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang setiap saat mewarnai hidupku dalam suka dan duka.

14. Teman-teman sejawat Andi Syarul Ramadhan, Junaedy, Sry Marlinda, Wiwid Ayu Ariska, Try Muliani Saputri, Nurul Khairunnisa.

15. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik yang tidak sempat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan dan kepada kalian diucapkan terima kasih.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. *Amin yaarabbalalamin.*

Billahitaufikwalhidayah

WassalamuAlaikumWr. Wb.

Makassar, 31 Agustus 2017

Penyusun,

Imma Multazam
NIM: 10300112029

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| ABSTRAK | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1-14 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Pengertian Judul | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Metodologi Penelitian | 9 |
| F. Tujuan dan Kegunaan | 12 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIK DALAM BIDANG PENYIDIKAN | 15-24 |
| A. Pengertian Penyidik | 15 |
| B. Syarat-Syarat Penyidik | 19 |
| C. Wewenang Penyelidik, Penyelidik, dan Penyidik Pembantu | 21 |
| BAB III TINJAUAM UMUM TENTANG TIDAK PIDANA KORUPSI | 25-36 |
| A. Pengertian Korupsi..... | 25 |
| B. Korupsi dalam Undang-Undang | 26 |
| C. Korupsi Secara Teoretis | 28 |
| D. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Normatif –Hukum | 29 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| E. Korupsi Indonesia Saat Ini | 34 |
|-------------------------------------|----|

BAB IV PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAN KPK DALAM PENYIDIKAN

| | |
|-----------------------------|-------|
| TINDAK PIDANA KORUPSI | 37-62 |
|-----------------------------|-------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Peran Penyidik Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi..... | 37 |
| B. Peran Penyidik KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi48 | |
| C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Peran Penyidik Kepolisiandan KPK dalamTindak Pidana Korupsi..... | 54 |

| | |
|---------------------|-------|
| BAB V PENUTUP | 63-65 |
|---------------------|-------|

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Implikasi | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab –Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | sa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik bawah) |
| خ | Kha | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Žal | z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik bawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Qi |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |
| هـ | Ha | h | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ا | <i>fathah</i> | a | a |
| إ | <i>kasrah</i> | i | i |
| و | <i>dammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أ | <i>fathah dan yā’</i> | ai | a dan i |
| أو | <i>fathah dan wau</i> | au | i dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| ا | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | <i>ā</i> | a dan garis di atas |
| ي | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | <i>ī</i> | i dan garis di atas |
| و | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | <i>ū</i> | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَتَلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpiyah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : <i>rauḍah al-atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-ḥikmah</i> |

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi *syaddah*.

Contoh:

| | |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i> |
| نَجَّيْنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-ḥaqq</i> |
| نُعَمُّ | : <i>nu''ima</i> |
| عُدُوُّ | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ditransliterasikan dengan huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

| | |
|-----------|----------------------------------------------|
| عَلِيٌّ | : <i>'Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly) |
| عَرَبِيٌّ | : <i>'Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) |

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *Syai 'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata Mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *Subhanahu wa Ta'āla*
saw. = *shallallāhu 'alaihi wasallam*
a.s. = *'alaihi al-salām*
H = Hijriyah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4
HR = Hadis Riwayat
t.p. = Tanpa penerbit
t.t. = Tanpa tempat
t.th. = Tanpa tahun
h. = Halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Imma Multazam
NIM : 10300112029
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Peran Penyidik Kepolisian dan KPK dalam Tindak Pidana Korupsi
ditinjau dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam

Tujuan dari penelitian tersebut adalah 1) untuk mengetahui peran penyidik Kepolisian dan peran penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi 2) untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum nasional dan hukum Islam atas peranan kepolisian dan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan metode penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka) dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (Hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Positif). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, data sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara identifikasi yaitu mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian, reduksi data dalam hal ini memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemberantasan tindak pidana korupsi yakni melalui cara-cara yang diatur dalam KUHAP maupun undang-undang lainnya. Peran Polri dalam menekan terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan upaya-upaya hukum secara profesional. Peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan implikasi penelitian yang penulis telah dapatkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan melakukan upaya pelatihan-pelatihan administrasi maupun pembuatan laporan penanggungjawaban anggaran sehingga tingkat besar kecilnya kerugian Negara yang ditimbulkan maupun motif beserta system peradilan agar pada penerapan hukumnya dapat lebih proporsional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah keuangan negara yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan, kendati adanya tekad bulat Kabinet Indonesia bersatu di bawah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang diagendakan dalam reformasi 1998 yaitu “Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme”.¹ Kesulitan dapat berasal dari diri aparat penegak hukum, ketidaksiapan undang-undang, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berperan serta untuk memberantas KKN. Ilustrasi faktual pemberitahuan media massa tahun 2002 lalu dapat digambarkan, betapa penegakan hukum terhadap KKN tidak mudah dilakukan seperti membalik telapak tangan. Kesulitan justru bersumber dari perilaku aparat penegak hukum atau birokrat dalam rangka menaati aturan undang-undang dan menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kondisi dilematis dalam penegakan hukum pada era reformasi.

Beberapa anggota DPR/MPR dan tokoh masyarakat mengemukakan kasus ketidakjujuran pada saat negara sedang gencar mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dengan memberantas perbuatan KKN dan birokrat atau mantan pejabat dan masyarakat di segala lini.²

¹Marwan Efendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Referensi, 2012), h. 221.

²Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, dan Kepalilitan* (cet: 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 19.

Ada mantan pejabat, pejabat Orde Reformasi, pengusaha bahkan anggota dewan terhormat di pusat dan daerah. Berbagai profesi seolah-olah berlomba melakukan korupsi dengan menggasak keuangan negara. Para koruptor merasa tidak bersalah dan tidak takut terhadap “kekuatan moral”. Semua ini tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintahan yang berkuasa dan entah kapan akan terwujudnya pemerintahan bersih yang menjadi dambaan semua orang.³

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UUD 45 adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaats) hukum kekuasaan belaka (machtsstaats), sehingga pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴

Di mana keberadaan KUHAP telah mencabut berlakunya Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang No.1 Tahun 1951 beserta semua peraturan pelaksanaan di Indonesia. KUHAP merupakan produk hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan berlandaskan sumber tertib Hukum Kolonial.⁵ Dengan terciptanya KUHAP maka Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi hukum yang lengkap meliputi seluruh proses pidana dari awal sampai kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (PK).⁶ Perbedaan landasan sumber tertib hukum tersebut mengakibatkan

³Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, dan Kepalilitan*, h. 17.

⁴Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama* (Bandung: Pustaka setia, 2007), h. 67.

⁵Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nussy, *Kamus Hukum Lengkap* (Cet. I; Jakarta: Media Pustaka, 2012), h. 23.

⁶Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1-2;

perbedaan asas yang sangat mencolok antara HIR dan KUHAP, bahkan bisa dikatakan sebagai reformasi total dari hukum acara pidana yang HIR tentang Hak Azasi Manusia dari tersangka atau terdakwa yang di dalam KUHAP diatur pasal (50-68 KUHAP) tentang bantuan hukum “within sight, not within hearing (pasal 69-74 KUHAP).⁷

Selanjutnya KUHAP mengatur tentang praperadilan, prapenuntutan, ganti kerugian, apabila terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan terhadap orangnya dalam proses peradilan pidana.⁸

Berbicara tentang komponen sistem peradilan pidana yang pertama yaitu: pendidikan yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik yaitu: pejabat negara RI atau pejabat negeri sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus, oleh Undang-Undang untuk kepentingan Penyidik, Penyelidik, Penyidik Pembantu yang berhak melakukan penangkapan.⁹

Mengingat Penyidik maka hubungannya sangat erat dengan penangkapan penyidik adalah: pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹⁰ Sedangkan penyidikan adalah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

⁷Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2014), h. 254.

⁸Oemar Seno Adji, *Pengawasan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan* (Makalah disampaikan pada Lokakarya dan Seminar hal-hal baru yang terkandung dalam KUHP, Jakarta 7-8 Desember 1983), h. 1-2.

⁹KUHAP Lengkap dihimpun oleh Redaksi Bumi Aksara, Cet ke 5 (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), PS 16.

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.28.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penangkapan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengurangi kemerdekaan seseorang, maka penangkapan terhadap seseorang harus menjunjung tinggi hak asasi rakyat/manusia dan hukum. Hak asasi manusia menjadi dasar setiap orang untuk melakukan perlakuan wajar walaupun seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana, ia harus dilakukan sebagai pribadi yang tidak bersalah selama belum ada putusan dari Pengadilan.¹¹ Dengan adanya Perundang-undangan atau peraturan tersebut diharapkan hak-hak tersangka (harkat dan martabat tersangka) akan terlindungi dan sisi lain petugas tidak melampaui batas wewenangnya karena adanya pertanggungjawaban penyidik POLRI bila melakukan kekeliruan dalam penangkapan sehingga terciptalah masyarakat aman tentram dan damai.¹²

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Mengayomi, membimbing dan melindungi serta melayani masyarakat,
2. Menegakkan hukum yang berlaku sehingga masyarakat dapat hidup tentram, aman dan sejahtera. Selain itu polisi juga mempunyai tugas memberantas dan mencegah kejahatan.

Undang-undang No.13 tahun (1061) (pasal 3) menetapkan bahwa kepolisian negara RI adalah: Angkatan Bersenjata RI. Kemudian UU No.20 tahun 1982 telah ditetapkan bahwa Angkatan Bersenjata RI terdiri dari: TNI, AD, TNI-AL, TNI-AU dan POLRI. Oleh karena itu peranan penyidik sebagai alat penegak hukum diperlukan kesadaran dan kesabaran yang cukup tinggi dan juga kemampuan yang luar biasa yang dibedakan dengan prajurit lainnya. Untuk mewujudkan masyarakat

¹¹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 44.

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.28.

Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.¹³

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus korupsi.

Dalam rumusan Yuridis formal istilah korupsi ditetapkan dalam Bab II pada Pasal 2-16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa:¹⁴

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara perekonomian negara.

¹³Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 44.

¹⁴Amirullah, *Tindak Pidana Money Laundering* (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), h.15

Berdasarkan data-data tersebut bahwa penyidik atau peran KPK, Kepolisian dan masyarakat mempunyai peranan dan fungsi penting dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data tersebut ternyata ada masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam judul “Peran Penyidik Kepolisian dan Kpk dalam memberantas Korupsi ditinjau dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di muka terdapat beberapa permasalahan.

Permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan penyidik kepolisian dalam memberantas korupsi?
2. Bagaimanakah peran lembaga KPK dalam menanggulangi pelaku tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum Nasional dalam memberantas korupsi?

C. Pengertian Judul

- a. Penyidik : Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan: adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

- c. Tindak pidana korupsi suatu perbuatan yang korup menodai pertanggungjawaban bagi sedikitnya satu sistem dari tertib umum atau warga negara dan sudah tentu bertentangan dengan sistim tersebut

D. Kajian Pustaka

Untuk lebih sistematis, penulis perlu mengemukakan beberapa konstruksi pemikiran dalam menganalisis tindak pidana pencucian uang di tinjau dari Hukum Islam. Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. I Ktut Sudiharsa, dalam bukunya *Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Perbankan* menjelaskan, bahwa tindak pidana korupsi mempengaruhi atau membawa dampak makro ekonomis suatu negara.¹⁵ Namun dalam buku ini belum menjelaskan secara spesifik mengenai tindak pidana pencucian uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 dan pemberantasannya secara khusus.
2. Arman Nefi dalam bukunya *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Dalam buku ini menjelaskan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya.¹⁶ Tapi dalam buku ini belum mengkaji secara spesifik dan khusus mengenai kapan seseorang dikatakan melakukan tindak

¹⁵I Ktut Sudiharsa, *Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika), h. 51.

¹⁶Arman Nefi, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), h. 51.

pidana pencucian uang. Dan maka dari itu penulis menjadikan referensi sebagai dasar untuk memahami tindak pidana pencucian uang.

3. Peter J. Quirk, penasihat *Internasional Monetary Fund* (IMF), dalam tulisannya yang berjudul *Money Laundering* menjelaskan, bahwa tindak pidana korupsi mempengaruhi atau membawa dampak makro ekonomis suatu negara.¹⁷ Namun dalam buku ini belum menjelaskan secara spesifik mengenai tindak pidana pencucian uang menurut dan pemberantasannya secara khusus.
4. Sarah N. Welling dalam bukunya *Money Laundering* sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal atau aplikasi ilegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah. Welling menekankan bahwa pencucian uang adalah suatu proses mengaburkan, menyembunyikan uang-uang ilegal melalui sistem keuangan sehingga ia akan muncul kembali sebagai uang yang sah. Senada dengan pendapat di atas, Pamela H. Bucy mengemukakan pengertian pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber ilegal, pergerakan atau kepemilikan uang atau alasan apapun.¹⁸ Namun dalam buku ini Dari beberapa pendapat tersebut belum menjelaskan secara terperinci kapan seseorang dikatakan terbukti dan melakukan tindak pidana pencucian uang.
5. Bardan Nawawi Arief dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.¹⁹ Mengatakan bahwa korupsi bagian dari tindak pidana pencucian uang adalah mengubah atau memindahkan proses harta uang yang diketahuinya

¹⁷Peter J. Quirk, *Internasional Monetary Fund* (IMF) (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 3.

¹⁸Sarah N. Welling, *Money Laundering* (Bandung: PT. Citra Asitya Bakti, 2013), h. 15.

¹⁹Bardan Nawawi Arief, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), h. 71.

berasal dari kejahatan dengan tujuan asal-usul gelap untuk menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya dalam melakukan kejahatan.

6. Marwan Efendy, dalam bukunya *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*. Mengatakan bahwa pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang harus aktif guna memastikan bahwa kendala-kendala yang berhubungan dengan lambatnya upaya hukum dan grasi, serta pelaksanaan dari eksekusi hukuman mati.²⁰

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan istilah *Library Research* yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.²²

²⁰Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 54.

²¹Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), h. 109.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), h. 6.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang meninjau dan menganalisa peran penyidik dalam penyidikan dan lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan lain yang digunakan yaitu *teologi normatif* (Hukum Islam) yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan berdasarkan hukum Islam yaitu meninjau tindak pidana korupsi berdasarkan hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan yuridis.²³ Lazimnya di dalam, ada 2 macam data yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer,

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Norma dasar: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan Perundang-undangan: UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No.28 tahun 1997, UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman UU No.13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian.

b. Data Sekunder

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*, h. 12.

Bahan hukum sekunder, yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, artikel yang berkaitan dengan penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Peranan Penyidik dalam Pemeriksaan Hukum Pidana pada tahap penyidikan
 - 2) Koran Tempo, tanggal 6 Januari 2002
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pada dasarnya data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan menggunakan metode kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan tidak menurut sama persis yang ada di buku melainkan menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa sendiri.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.²⁴ Metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) *Identifikasi* data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*, h. 12.

- 2) *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
- 3) *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan dan tujuan khusus yang diklarifikasikan sebagai berikut:

a. Tujuan umum

Tujuan Umum bertujuan Untuk mengetahui peran penyidik kepolisian dan lembaga KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum Islam dan hukum nasional.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk peran penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- 2) Untuk mengetahui peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum Nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana Nasional. Dalam disiplin ilmu hukum Islam, penelitian ini memberi manfaat dalam menumbuhkan generasi muda akan pentingnya menganalisis tindak pidana pencucian uang ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan mengetahui konsekuensi dari tindak pidana pencucian uang diharapkan para pembaca menyadari bahwa tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana Nasional dapat di analisis dan di tinjau dalam hukum Islam.

b. Kegunaan praktis

- 1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat di pergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan dan penyusunan undang-undang dan buku pengetahuan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi

- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana Nasional dan hukum pidana Islam.
- 3) Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan atau informasi yang berarti dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya spesifikasi pengetahuan dibidang hukum Islam tentang tindak pidana korupsi.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIK DALAM BIDANG PENYIDIKAN

A. *Pengertian Penyidik*

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang :¹

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
10. Mengadakan penghentian penyidikan

¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.² Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah untuk :³

Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu”.⁴ Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah :

- a. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
- b. Identitas daripada sikorban;
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- d. Waktu terjadinya kejahatan;
- e. Motif, tujuan serta niat;
- f. Identitas pelaku kejahatan .⁵

²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59.

³Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. v.

⁴Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, h. 42-43;

⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59.

Ketentuan Umum Dalam Bab I ketentuan umum KUHAP pasal 1 mengatur pengertian dari beberapa istilah yang dipergunakan. Istilah yang dimaksud antara lain: Penyidik, Penyidikan, Penyidik Pembantu, Penyelidik, Penyelidikan, tersangka, penyitaan, penggeledah rumah, penangkapan, penahanan, laporan pengaduan, saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, keluarga. Berbicara masalah penyidikan dalam Bab I butir 1 diatur tentang pengertian Penyidik yang selengkapnya berbunyi: ⁶

Pasal 1 butir 1: “Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidik itu terdiri dari:

1. Pejabat Polisi Negara RI
2. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selanjutnya yang berwenang melakukan penyidikan selain penyidik kepolisian adalah pejabat pegawai negeri sipil.

Pada Pasal 1 butir 2 dijelaskan bahwa: ⁷

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 butir 5:

⁶E.Y. Kanterdan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, h. 73.

⁷Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi “Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945”* (Cet. II; Malang: Setara Press, 2012), h. 157.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tapi merupakan suatu fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu tindakan berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyerahan dan penyelesaian berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidikan di sini adalah penyelidikan tindak pidana (kriminil), karena penyelidikan ini hanya merupakan cara atau metode dari pada penyidikan.⁸Kedudukan dan kepangkatan penyidik diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga polri (serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama bagi daerah atau sector kepolisian terpencil, masih banyak yang dapat dijabat anggota polri berpangkat Bintara yang bukan Bintara Tinggi.⁹Jadi jika persyaratan penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan jika lembaga Penyidik Pembantu tidak ada, maka untuk daerah sector kepolisian yang terpencil tersebut akan mengambil alih hambatan dalam pelaksanaan penyidikan.

⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* “Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, h. 31.

⁹Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi “Problematisasi Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945”* (Cet. II; Malang: Setara Press, 2012), h. 157.

B. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.¹¹

Tugas polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-

¹⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 79.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 42.

pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya:¹² korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang).

Sebelum penyidikan di mulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa.¹³ Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa :

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang dilahan dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pembedaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan”.¹⁴

Apabila diperhatikan secara seksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan , selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus

¹²DeniSetyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana “Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana”* (Malang:Setara Press, 2014), h. 232..

¹³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: SinarGrafika, 2012), h. 59.

¹⁴RuslanRenggong, *Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2014), h. 1.

berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia .

Menurut Andi Hamzah, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan khminologi.”¹⁵

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

C. Wewenang Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu.

Setelah mengetahui tentang ruang lingkup dan pengertian penyidikan selanjutnya akan dijelaskan tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik. Pemberian kewenangan kepada penyelidik, penyidik pembantu bukan berdasarkan atas kekuasaan melainkan berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya, maka kepada masing-masing pejabat tersebut diberikan kewenangan

¹⁵Kartini Malarangan, *Clavia “Sarana Kominikasi dan Pengembangan Hukum* (Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, 2006), h. 161.

yang disesuaikan dengan beratringannya kewajiban dan tanggungjawab masing-masing kedudukan, tingkat pangkat dan pengetahuannya.¹⁶Dalam pasal 5 dijelaskan.

1. Karenakewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerimalaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti:
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan surat.
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Sedangkan wewenang penyidik polri diatur dalam pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷

Pasal 7:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

¹⁶Mr. Lj. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 28.

¹⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
- g. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- k. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- l. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Jika ada suatu hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik maka penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti penyidik kepolisian kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik polri.¹⁸

Pasal (3) menjelaskan bahwa:

¹⁸Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: MitraWacana Media, 2014), h. 33.

Penyidik pembantu adalah: pejabat kepolisian negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *corrupti* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah, sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*. Dari bahasa latin inilah, turun ke dalam bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruptio, corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie (Korruptie)*. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yakni korupsi. Secara linguistik, kata “korupsi”¹ berarti kemerosotan dari semua hal yang baik, sehat, dan benar, serta menjadi penyelewengan dan kebusukan. Poerwadarmita dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Pengertian korupsi secara sosiologis lebih luas dan umum dibandingkan dengan pengertian korupsi secara yuridis formal berdasarkan hukum positif Indonesia. Hal ini akan sangat mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan, mulai dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi

¹ Andi hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. II, hal.4

dari atas hingga bawah seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, kemasyarakatan, dunia pendidikan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi². Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan. Korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

B. *Ketentuan Undang-Undang Dalam Tindak Pidana Korupsi*

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1971 pasal 1 ayat (1) butir a:³

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) butir b mengatakan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu: Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 1 ayat 1 butir c.

²Irfan Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pena Grafika), cet 1, hal.5

³ Irfan Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pena Grafika), cet 1, hal.13

Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 KUHP.

Pasal 1 ayat (1) butir d:

Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Pasal 1 ayat (1) butir e: barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal –pasal 418, 419, 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang diirujuk oleh UU Nomor 3 tahun 1971 adalah sebagai berikut.

Pasal 209 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah:

1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud mengerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Barangsiapa memberi sesuatu kepada seseorang pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

C. Korupsi secara Teoritis

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corruptere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mendeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama⁴. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mendeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

⁴Irfan Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Pena Grafika), cet 1,hal

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat⁵.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Normatif Hukum

Memperhatikan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang undang Nomor 20 tahun 2001⁶, maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif, Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut : Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

⁵Hatta Moh, *Kpk dan sistem peradilan pidana*, (Yogyakarta:liberty Yogyakarta), cet 1, Hal.5

⁶Hatta Moh, *Kpk dan sistem peradilan pidana*, (Yogyakarta:liberty Yogyakarta), cet 1, Hal 1

Negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara,atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Memberi hadiah Kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999⁷). Percobaan pembantuan,atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001). Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tagun 2001). Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,melakukan perbuatan

⁷Hatta Moh, *Kpk dan sistem peradilan pidana*, (Yogyakarta:liberty Yogyakarta),cet 1,hal. 13

curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal (1) huruf Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001). Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara nasional Indonesia atau Kepolisian negara Reublik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 20 tahun 2001). Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara nasional indpnesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja mebiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang di tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau mebiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001). Otonomi daerah yang awalnya bertujuan untuk meratakan dan memajukan penduduk justru malah berimbah pada

meratanya tradisi korupsi ke daerah-daerah⁸. Pegawai negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Pegawai negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 e undang-undang Nomor 20 tahun 2001)

Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya. padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf f). Pada waktu menjalankan tugas meminta atau

⁸Tarmizi Taher, *Jihat NU-Muhammadiyah Memerangi Korupsi*, hlm 109

menerima pekerjaan atau penyerahan barang seplah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g). Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i).

Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai berikut :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001). Orang yang menerima penyerahan bahan atau keparluan tentara nasional indonesia, atau kepolisian negara republik Indonesia yang mebiarkan

perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c Undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2001).

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 20 tahun 2001). Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 huruf c Undang-undang nomor 20 tahun 2001). Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 12 huruf d Undang-undang nomor 20 tahun 2001).

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (pasal 12 Undang-undang nomor 20 tahun 2001).

E. Kondisi Korupsi di Indonesia Saat Ini

Sudah berbulan-bulan media massa memberitakan tentang kasus korupsi. Dari pemberitaan itu, terlihat jelas sangat banyak elit dan pemimpin kita yang terlibat

korupsi. Mulai elit di pusat pemerintahan nasional hingga daerah. Demikian pula melibatkan elit politik DPR RI, birokrat, dan pengusaha. Menurut Bung Hatta seperti dikutip Masdar Hilmy⁹, di era orde baru korupsi diindonesia sudah sampai oada tahap membudaya, jika sebelumnya yang banyak melakukan korupsi adalah pemerintah tingkat pusat, di era reformasi korupsi hamper terjadi disemua lini (eksekutif,yudikatif, dlegislatif baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah)

Berita yang sangat mengejutkan, bahkan Akil Mochtar (Ketua Mahkamah Konstitusi) tertangkap tangan melakukan korupsi. Suatu lembaga yang sangat terhormat dengan kekuasaan yang sangat besar, justru terbukti melakukan tindakan Korupsi. Sebagai mana diketahui, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah: Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Berkewajiban memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, berkewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan berbagai kekuasaan yang sangat

⁹Irfan Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Pena Grafika), cet 1,hal.9

urgen bagi kepentingan nasional. Dengan wewenangnya yang luar biasa, sudah seharusnya, Mahkamah konstitusi bisa menjaga diri dari berbagai kelemahan, terlebih lagi terhadap korupsi. Tetapi kenyataannya Mahkamah Konstitusi terlarut kedalam pusaran masalah korupsi. Sehingga korupsi telah meraja lelah disemua sector kehidupan, baik di yudikatif, eksekutif, dan di legislatif. sehingga tidak salah kalau dikatakan, bahwa indonesia berada dalam kondisi darurat korupsi.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa hampir semua lini kehidupan di Indonesia dewasa ini harus diselesaikan dengan “Sogokan dan berbagai uang pelicin lainnya. Mulai dari mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) di Kelurahan, mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi), KK (Kartu Keluarga), masuk sekolah, sampai urusan yang besar, seperti memenangkan tender suatu proyek, ataupun untuk promosi dan lain sebagainya. Semuanya membutuhkan sogokan dan uang pelicin. Sehingga tidak salah kalau para investor yang mau menanamkan modalnya ditanah air harus melalui semua proses tadi. Akibatnya biaya investasi yang tertulis tidak sebanding dengan real cost (biaya nyata) yang harus dibayar, karena panjangnya birokrasi dan semua tahap harus mengeluarkan uang. Akhirnya, para investor malah untuk menanamkan modalnya di Tanah Air, dan berpindah ke negara tetangga seperti Malaysia, misalnya kasus pendirian RIM pabrik BlackBerry.

Untuk membasmi korupsi dan pungutan liar tersebut, sangat tidak mudah bahkan mustahil, karena kondisi ini telah berurat berakar dan telah menjadi budaya. Padahal untuk kemajuan suatu bangsa di zaman modern, budaya korupsi dan pungutan liar menjadi penghambat yang sangat besar untuk kemajuan.

BAB IV

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAN KPK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Peran Penyidik Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Undang-undang no 31 tahun 1999, pada pasal 2 dijelaskan yaitu: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Pemerintah sebagai pembuat regulasi dan pengayom masyarakat menjadi sebuah mesin pencetak uang bagi para Koruptor¹. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 14 huruf g menyebutkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dan sesuai dengan bunyi pasal 25 UU no 31 tahun 1999 tentang

¹Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 86

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa²: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hokum, meskipun dalam perkembangannya selain Polisi dan Jaksa, Negara membentuk lembaga lain yang khusus menangani tindak pidana korupsi yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK). Dalam hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang merupakan *Ecstra Ordinary Crime* dan mempunyai implikasi sangat besar bagi terhambatnya kemajuan negara, juga sebagian besar pelaku korupsi berada pada jalur birokrasi yang memegang kekuasaan sehingga di butuhkan lembaga superbodi agar bisa melewati regulasi yang ada³.

Sebagai contoh peran kepolisian dalam melakukan penyidikan korupsi terhadap kasus BNI, kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur ataupun Bupati, dalam prosesnya penyidik kepolisian menghadapi banyak kendala untuk melakukan pemblokiran terhadap suatu rekening Bank yang diduga sebagai hasil pidana korupsi, kepolisian harus memiliki bukti awal yang cukup dan didasari dengan laporan polisi yang resmi, dikirimkan melalui Bank Indonesia dan harus mendapat persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia yang tentu saja prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Demikian halnya dalam melakukan pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka terhadap para kepala daerah seperti Gubernur maupun Bupati, kepolisian

²Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 12

³Teguh Sulistia, *Penegakan Hukum terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (Padang: FH Unand, 2012), h. 71

harus mendapatkan persetujuan oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri yang sudah barang tentu juga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Namun dengan segala keterbatasannya itu kepolisian selalu berusaha ekstra keras untuk bersama-sama lembaga terkait dalam memberantas Korupsi. Karena korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi tidak hanya dari luar akan tetapi juga dari dalam lembaga Kepolisian itu sendiri, ada anekdot yang mengatakan bahwa mustahil membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor, artinya mustahil Polri mampu memberantas Korupsi bila dari dalam internal kepolisian sendiri masih melakukan perbuatan-perbuatan yang koruptif; seperti pungutan liar, makelar kasus, jual beli jabatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk⁴:

1. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
2. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
3. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jari;
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka,saksi
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (periksa pasal 7 ayat (1) KUHAP).

⁴Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 33

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikannya itu dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya⁵. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik. (pasal 110 ayat (1-4) KUHAP. Untuk dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, maka Hakim menurut pasal 183 KUHAP tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

⁵Mr. Lj. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PradnyaParamita, 2009), h. 28

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dapat dijumpai dalam pasal 184 KUHAP dalam ayat (I), yaitu⁶ :

1. Keterangan Saksi

Menurut pasal 185 ayat (I) KUHAP bahwa keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan oleh saksi disidang pengadilan. Hal ini telah jelas diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP sedangkan pada ayat (2) pasal ini menetapkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seorang tersangka bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya keterangan saksi akan merupakan bukti yang sah, jika keterangan itu benar-benar didasarkan pada apa yang dia dengar sendiri atau dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya (pasal 1 butir 27). Tidak merupakan keterangan saksi jika keterangan yang diberikan oleh saksi hanya merupakan hasil pemikiran atau rekaan saksi belaka saja (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).Keterangan saksi merupakan alat pembuktian yang utama, karena seseorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu memungkirinya adanya suatu bukti, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan

⁶Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2014), h. 1

melihat atau mengalami kejadian-kejadian yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut.

2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam KUHAP pasal 1 butir 28 dinyatakan bahwa : keterangan ahli merupakan keterangan seorang ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan (lihat pasal 186 KUHAP)⁷.

3. Surat

Mengenai surat telah ditetapkan secara terperinci dalam pasal 187 ayat (1) huruf (c) KUHAP dan dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun maksud surat yang tercantum dalam pasal 187 ayat (1) huruf (c) adalah sebagai berikut⁸:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan-keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;
- b. Surat-surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam data

⁷Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2014), h. 1

⁸Kartini Malarangan, *Clavia “Sarana Kominikasi dan Pengembangan Hukum* (Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, 2006), h. 161

Pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Mengenai petunjuk ini dapat dijumpai dalam pasal 188 ayat (I) KUHAP yaitu “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa : petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) adalah⁹:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

5. Keterangan terdakwa

Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau dia alami sendiri (lihat pasal 189 ayat (I) KUHAP) Sedangkan pada pasal 189 ayat (2) menerangkan bahwa: keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang

⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59

didakwakan kepadanya. Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan: “fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas. Yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi¹⁰”. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi ialah:

- a. Barang bukti atau physical evidence, seperti : anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan ;
- b. Dokumen serta catatan, seperti : cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman;
- c. Orang-orang seperti : korban, saksi , korban, si tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.

Untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut diperlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia,

¹⁰Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75

fisika dan lain-lain. Penyidikan adalah : “Pusat dan pimpinan dalam penyidikan semua aktifitas atau kegiatan serta tindakan yang diambil dalam mencari kejelasan seperti yang dimaksud dalam fungsi penyidikan adalah sepenuhnya tergantung dari kebutuhan. Bagi penyidik, penyidikan juga menentukan perlu tidaknya suatu pemeriksaan”. Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu¹¹ :

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
- b. Pengeledahan;
- c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;
- d. Diambil dari pihak ketiga;
- e. Barang temuan;

1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penanganan TKP menurut Departemen Hankam Mabes Polri adalah¹²:

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan ditemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta

¹¹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, h. 42-43

¹²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59

- memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP ;
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah ;
- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban , saksi-saksi ,barang bukti., modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana.

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melaporkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Kemudian menurut Departemen Hankam Mabes Polri, apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat,

penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Pengamatan umum terhadap obyek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan ;
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan , perlu dimintakan Visum et Repertum. Hal ini sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa : penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) (pejabat Polri) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;

- d. Penanganan barang bukti; Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidik, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya, sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan¹³.

B. Peran Lembaga KPK Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan prioritas rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar strategi yang komprehensif tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut¹⁴.

1. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara
2. Pemantapan dan Percepatan reformasi birokrasi
3. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat, dan
4. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai beberapa tugas, yaitu diantaranya¹⁵:

¹³Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2014), h. 1.

¹⁴Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 56

¹⁵Teguh Sulistia, *Penegakan Hukum Terhadap Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme* (Padang: FH Unand, 2012), h. 71

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang¹⁶ :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

¹⁶I Ktut Sudiharsa, *Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Perbankan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), h. 51

Selengkapnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun¹⁷.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK

¹⁷Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"* (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 25

bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Ada tiga pendekatan yang dapat diklasifikasikan untuk mencegah dan memberantas korupsi yang tepat yaitu:

1. Strategi Preventif.

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

2. Strategi Deduktif.

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

3. Strategi Represif.

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun

implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan.

Negara mengeluarkan 3 produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kesimpulan dari ketiga UU yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lex specialis generalis*. Materi substansi yang terkandung didalamnya antara lain¹⁸ :

1. Memperkaya diri/orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik yang berstatus PNS atau No-PNS serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999).
5. Menyuap PNS atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 UU No.20 Tahun 2001).
6. Perbuatan curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).
7. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

¹⁸Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 58

Oleh karena itu, keberadaan produk regulasi yang diberikan Negara untuk menyelamatkan keuangan Negara dari perilaku korupsi, sangatlah dituntut kepada para aparat penegak hukum lainnya untuk semaksimal mungkin dapat memahami rumusan delik yang terkait dan menyebar di setiap pasal yang ada agar tepat dalam menerapkan kepadapara pelaku. selain itu juga diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang sangat jitu dan tepat.

Penerapan sanksi normatif mengenai korupsi kepada para pelakunya tidak akan bermanfaat dan bernilai penyesalan bilamana tidak diikuti juga beberapa strategi. Ada 3 hal yang harus dilakukan guna mengurangi sifat dan perilaku masyarakat untuk korupsi, antara lain¹⁹;

1. menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah
2. menaikkan moral pegawai tinggi, serta
3. legislasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal.

C. Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana Nasional

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan, dan merugikan kepentingan umum²⁰. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang banyak, hal inilah yang dikatakan sebagai *jarimah ta'zir*. Tindak Pidana

¹⁹Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 2014), h. 87

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 73

Korupsidimasukkan ke dalam jarimah ta'zir karena memenuhi berbagai kategori sebagai berikut²¹:

- a. Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, sebab merusak, merugikan, dan membahayakan kehidupan manusia.
- b. Perbuatan tersebut mencegah terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.
- c. Adanya unsur merugikan kepentingan umum.
- d. Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum.
- e. Perbuatan itu merupakan maksiat yang dilarang.
- f. Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam²².

Dan dasar hukum atau larangan pencurian uang pula dicantumkan dalam Qs Al-Maidah/5:38 yakni sebagai berikut:

فَاقْطِعُوا أُيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

()

Terjemahnya:

²¹Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 12

²²Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (cet: 1 Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 537.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana²³”.

Sesungguhnya landasan hukum potong tangan adalah kajian kejiwaan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, hukuman potong tangan ini adalah hukuman yang cocok bagi setiap individu. Pada waktu yang sama, juga tepat bagi masyarakat karena hukuman ini akan meminimalisir kejahatan dan menentramkan masyarakat. Kalau hukuman itu paling cocok bagi perorangan dan tepat bagi masyarakat, maka itu merupakan hukuman yang paling utama dan paling adil.

Namun, hukuman itu belum mencukupi bagi sebagian orang untuk membenarkan hukuman potong tangan. Karena, mereka memandangnya, sebagai hukuman yang amat kejam. Akan tetapi argumentasi tersebut sangatlah lemah, karena tidaklah hukuman dikatakan *iqaab* apabila lunak dan lemah, bahkan terkesan bermain-main dan gurau atau yang semakna dengan itu. Karena itu, sifat keras atau pedih ini harus tercermin di dalam ‘uquubah ‘hukuman’ sehingga tepat bila itu disebut ‘uquubah.

Para ulama Indonesia bersepakat bahwa kejahatan korupsi sejajar dengan pencurian dan penipuan. Kejahatan ini mendapat perhatian khusus, karena tindak pidana ini belum pernah dibahas para ulama zaman dahulu. ketentuan hukum yang disepakati para ulama ialah:

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 553

Bentuk penggelapan (ghulul) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah. Pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan hukuman *ta'zir* (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara). Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hukumnya haram. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib mengembalikan kepada negara dan negara memanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan telah mengembalikan kepada negara tidak dikenai hukuman. Ijtima' Ulama komisi fatwa se-Indonesia IV merekomendasikan: masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam menerima uang dari pihak yang diketahui atau diduga keras (*zhann*) sebagai pelaku tindak kejahatan.

Peranan polri dan kpk dalam melaksanakan tugasnya seharusnya menyelenggarakan tindakan penyidikan sebaik-baiknya dengan menggunakan kekuasaan secara adil sesuai ketentuan yang telah ada. Kewenangan ini juga telah diatur dalam QS. An-Nisaa ayat 9 yakni sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
أَطِيعُوا
أَطِيعُوا
لِلَّهِ وَالْيَوْمِ
خَيْرٌ
تَأْوِيلًا (59)

Terjemahnya :

“ wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

2. Tinjauan Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana²⁴:

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Penyelundupan tenaga kerja
6. Penyelundupan migrant
7. Di bidang perbankan
8. Di bidang pasar modal
9. Di bidang perasuransian
10. Kepabeanan
11. Cukai
12. Perdagangan orang
13. Perdagangan senjata gelap
14. Terorisme

²⁴M. Amir Amirullah., *Money Laundering*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 75

15. Penculikan
16. Pencurian
17. Penggelapan
18. Penipuan
19. Pemalsuan uang
20. Perjudian
21. Prostitusi
22. Di bidang perpajakan
23. Di bidang kehutanan
24. Di bidang lingkungan hidup
25. Di bidang kelautan dan perikanan

Atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.” Selain itu ditekankan secara langsung terhadap kejahatan terorisme, sebuah perkembangan politik nasional dan internasional baru terutama pasca peledakan gedung *World Trade Center di New York* Amerika Serikat pada 11/9/2001 yang menewaskan sekitar 3.000 orang, dan di Indonesia pasca Bom Bali I dan II.

Hemat penulis ini sebagian *raison d’etre* dimunculkan Pasal 2 ayat (2) untuk melengkapi pemahaman tentang pencucian uang dengan menegaskan dalam ayat

tersendiri bahwa, “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (n).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menekankan pada praktik, “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Kemudian Pasal (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menyatakan pidana juga berlaku bagi, “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena

tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)²⁵.

Kepada pihak yang membantu Pencucian Uang ini juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan sebagai tindak pidana, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).” Namun Pasal 5 ayat (2) memberikan “insentif hukum” pada *whistle blower* (pengabar kejahatan) bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Oleh karena itu, yang dimaksud dalam penjelasan itu ialah bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil tindak pidana, tidak perlu betul betul dibuktikan telah terjadi tindak pidana, tetapi dibuktikan telah ada bukti yang cukup atas terjadinya tindak pidana. Jadi mirip dengan tindak pidana Penadahan pada pasal 480 KUHP yang dalam beberapa yurisprudensi dinyatakan bahwa pemeriksaan tindak pidana

²⁵Robitul Firdaus, *Melawan Korupsi Demi Kemaslahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 22.

penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

Program Kenalilah Nasabah semula dimaksudkan untuk mengisi kekosongan peraturan selama Indonesia belum mempunyai Undang-Undang mengenai Tindak Pencucian Uang. Selain itu PBI memenuhi prinsip kelima belas dari dua puluh lima *Core Principal for Effective Banking Supervision* yang dimaksud untuk memenuhi rekomendasi FATF. Sebelum berfungsinya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyangkut bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Di Bank Indonesia unit kerja yang menerima laporan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction report*) adalah Unit Khusus Investasi Perbankan (UKIP), sehingga UKIP untuk sementara waktu menjalankan fungsi PPATK tersebut²⁶.

Ketentuan itu juga merupakan petunjuk teknis bagi semua bank di Indonesia untuk mencegah praktik pencucian uang. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administrasi dan denda Rp.1.000.000/hari dan setinggi-tingginya Rp.30.000.000.

²⁶Adrian Sutedi, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Cet 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 176

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Peran pemberantasan tindak pidana korupsi yakni melalui cara-cara yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lainnya. Mekanisme proses penyidikan tindak pidana, yaitu penerimaan laporan/pengaduan, pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan penanganan tempat kejadian perkara.
2. Peran lembaga KPK kewenangannya di berikan oleh undang-undang KPK. Berdasarkan pasal 6 undang-undang KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 undang-undang kpk selanjutnya membatasi bahwa kewenangan kpk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang :
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
 - b. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau

- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- 3. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah hukum potong tangan karna sesungguhnya landasan hukum potong tangan adalah kajian kejiwaan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, hukuman potong tangan ini adalah hukuman yang cocok bagi setiap individu. Pada waktu yang sama, juga tepat bagi masyarakat karena hukuman ini akan meminimalisir kejahatan dan menentramkan masyarakat. Kalau hukuman itu paling cocok bagi perorangan dan tepat bagi masyarakat, maka itu merupakan hukuman yang paling utama dan paling adil.

B. *Implikasi Penelitian*

- 1. Diharapkan kepada pemerintah agar memperkuat penyidik-penyidik polri yang handal, oleh karenanya dibutuhkan pelatihan-pelatihan khusus yang sifatnya kontinyu dan berkesinambungan, serta banyak melakukan sharing pengalaman dengan negara-negara lain yang lebih berpengalaman dalam melakukan pemberantasan korupsi.
- 2. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja kepolisian, kejaksaan maupun KPK dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga perlu dirancang undang-undang tindak pidana korupsi yang lebih relevan untuk saat inidan di masa-masa mendatang, agar dapat mencegah terjadinya korupsi, menimbulkan efek jera, dan

mengembalikan kerugian Negara. Selain itu perlunya dalam perundang-undangan tersebut menggolongkan korupsi dalam berbagai tingkatan besar kecilnya kerugian Negara yang ditimbulkan maupun motif, beserta system peradilannya agar pada penerapan hukumnya dapat lebih proporsional.

3. Diharapkan upaya hukum Islam dalam memberikan kontribusi terhadap hukum nasional terutama masalah hukum pelaku tindak pidana korupsi agar dapat memberantas korupsi dan memberikan efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Apeldoorn, Mr. L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Ahmed, Abdullahi An-Na'im. *Dekonstruksi Syariah*. Cet. IV; Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Aris, Ismail dan Syamsuddin Rahman. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Amir, Piliang Yasraf. *Dunia Yang Dilipat "Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan"*. Cet. I; Bandung: Matahari, 2011.
- Aria, Zurnetti dan Teguh Sulistia. *Hukum Pidana "Horizon Baru Pasca Reformasi"*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Abdul, Wahid dan Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum "Suatu Kajian Filosofis dan Yuridis"*. Cet. II; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.
- Agil, Al-Munawar Husin Said. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: PT. Penamadani, 2004.
- Audah, Abdul Qadir. *'At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamy, Juz 1*. Dar Al Kitab Al' Araby, Beirut, t.th.
- As-Sayuthi, Jalaluddin. *Al Asybah wa An Nazhair Al Furu'*.
- Ash-Shidiqie, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- , *Islam dan Ham*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- , *Pidana Mati Dalam Syariat Islam*. Cet. II; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ahmad, Beni Saebani. dan Supriatna, Encup. *Antropologi Hukum*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Ahmad, Beni Saebani dan Hasan Mustofa. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ahmad, Beni Saebani. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

-----, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka setia, 2007.

-----, *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Akdhiat, Hendra dan Marliani Rosleny. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Al-Bani, Syaikh Muhammad Nasiruddin. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Kampung Sunnah: Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009.

Bagus, Deni Setyo Yuherawan. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana "Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana"*. Malang: Setara Press, 2014.

B, Hallaq Wael. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Bram Deny, dan Marbun Rocky dkk. *Kamus Hukum Lengkap*. Cet. I; Jakarta: Media Pustaka, 2012.

Djazuli, A. *Fikih Jinayah*. Djakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

-----, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*. Jakarta : Kencana, 2014.

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers 2011.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ekromz, dan Yantirtobisono. *Kamus 3 Bahasa (Arab, Inggris, Indonesia)*. Surabaya: Apollo, 2012.

Freddy, Anton Susanto. *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' "Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

-----, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Hiariej, Eddy O.S. *Asas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.

-----, *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Ismansyah. *Politik Hukum Pidana Sebagai Bentuk Kebijakan untuk Menanggulangi Kejahatan*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2002.

Ismatullah, Deddy. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung: Pustaka setia, 2007.

Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1993.

Khoyin, Muhammad. *Filsafat Bahasa "Philoshopy Of Language"*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Khallaf, Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.

-----, *Ilmu Ushul Fikih*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

→ Topo santoso
Asas^{oo} pidana islam

- Malarangan, Kartini. *Clavia "Sarana Kominikasi dan Pengembangan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, 2006.
- Nasiruddin, Syaikh Muhammad Al-Bani. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Kampung Sunnah: Pustaka Ebook Ahlusunnah, 2009.
- Pabbu, Amiruddin dan Syamsuddin Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Mitra Wacana Media, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: PT. Refika Aditama, 2014.
- Penjelasan UUD-1945 dan TAP MPR No. V/MPR/ 1973.
- Rasyid, Daud. *Indahnya Syariat Islam*. Cet III; Jakarta: Usamah Press, 2010.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana "Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group, 2014.
- Sulardi. *Reformasi Hukum "Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi*. Malang: Intrans Publishing, 2009.
- S.R, Sianturi dan E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Saebani, Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Setia, 2010.
- Soetiksno, Mr. *Filsafat Hukum "Bagian 1"*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
- , *Filsafat Hukum "Bagian 2"*. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2013.
- Syaukani, Imam. *Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.
- Syamsuddin, Darussalam. *Nuansa Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 236 Tahun 2016
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2016

- Menimbang** :
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - Bahwa mere yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 jo No. 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Rektor Nomor 129 C tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
2. Dr. Hamsir, SH., M. Hum
Sebagai pembimbing mahasiswa :
Nama : Imma Multazam
NIM : 10300112029
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian terhadap Proses Penyidikan Perkara Korupsi di Indonesia
 - Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
 - Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2014;
 - Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 4 Maret 2016
Rektor,


Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar

Samata, 4 Maret 2016

Nomor : SI.2/PP.00.9/1106 /2016
Hal : **Undangan Seminar Proposal Skripsi**
An. Sdr (i). Ir. Sa Multazam

Kepada YTH.

1. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag (Pembimbing I)
2. Dr. Hamsir, SH., M. Hum (Pembimbing II)

Di,

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 22 Maret 2016

Waktu : 13.00 wita

Tempat : Ruang Yustisi Lt. 4 Fak. Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Terhadap Proses Penyidikan Perkara Korupsi di Indonesia

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Kepua Jurusan,
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Dra. Nila Sastrawaty, M. Si

NIP. 19710712 199703 2 002

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI


Nomor: /HPK/2016

Judul Skripsi: **"Peran penyidik kepolisian dan kpk dalam memberantas korupsi ditinjau dalam hukum nasional dan hukum islam"**

Samata, 24 Maret 2016
Penyusun,


Imma Multazam
NIM. 10300112029

Pembimbing I


Prof. Dr. Darussalam., M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

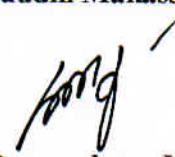
Pembimbing II


Dr. Hamsir, SH., M.Hum
NIP. 19610404 199303 1 005

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan HPK


Dra. Nila Sastrawaty., M.Si
NIP. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darussalam., M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 1217 Tahun 2017

T E N T A N G

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi HPK tanggal **11 Agustus 2017** perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 11 Agustus 2017
Dekan


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

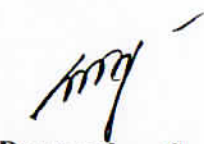
Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1217- TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

| NO | NAMA/NIM | TEAM PENGUJI | | | PELAKSANA KETUA/SEK/ANG. |
|----|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | MKDK/FIKIH & USUL FIKIH | MKDU/DIS | MKKP | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | Imma Multazam 10300112029 | Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A | Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc. | Dr. Hamsir, M.Hum | Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Mujahidah, S.E Nurhayati Wahid |

Samata, 11 Agustus 2017

Dekan


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
19621016 199003 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax: (0411) 864923
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 35, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax: (0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
SEMESTER 10 (SEPULUH) WISUDA PERIODE SEPTEMBER
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama : *Imma Multazam*

NIM : *10200112029*

Jurusan : *Hpk*

Judul Skripsi : *Peran Pengadilan keputusian dan kpk dalam memberantas tindak pidana korupsi ditinjau dalam hukum nasional dan hukum Islam.*

| NILAI MATA KULIAH | | | | JUMLAH RATA-RATA |
|---------------------|---------------------|----------|-------------|------------------|
| MKDU | MKDK | MKPP | KESELURUHAN | |
| (Dirasah Islamiyah) | (Fikih/Ushul Fikih) | | | |
| <i>3,5</i> | <i>3,3</i> | <i>3</i> | <i>9,8</i> | <i>3,26</i> |

Samata, *21 Agustus 2017*

Kasubag.
Akademik dan Kemahasiswaan

M. Hidayat

MUJAHIDAH, S.E
NIP : 19670309 199303 2 002

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 1231 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Imma Multazam
N I M : 10300112029
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan (HPK)
Hari/Tanggal : Rabu / 16 Agustus 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Peran Penyidik Kepolisian dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam."

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Kurniati, M.Hi
Penguji I : Dr. Hamzah, M.Hi.
Penguji II : Drs. Gazali Suyuti, M.Ag
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di
Pada tanggal
Dekan

: Samata
: 15 Agustus 2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : SI.1/PP.00.9/2948/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 15 Agustus 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Dra. Nila Sastrawati, M.Hi (Sekretaris)
 3. Dr. Hamzah, M.Hi. (Penguji I)
 4. Drs. Gazali Suyuti, M.Ag (Penguji II)
 5. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Pembimbing I)
 6. Dr. Hamsir, M.H. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

N a m a : Imma Multazam
N I M : 10300112029
Jurusan : Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan (HPK)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2017
Waktu : Pukul 13.00 – 14.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan HPK

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN

MAKASSAR

Nomor : 1350 Tahun 2017

66

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Imma Multazam
NIM : 10300112029
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Peran Penyidik Kepolisian dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 269 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Menetapkan** :
Pertama : **MEMUTUSKAN**
Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
Penguji I : Dr. Hamzah Hasan, M.H.I.
Penguji II : Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.H.I.
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E
2. Nurhayati Wahid
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
Makassar pada tanggal

: Samata
: 29 Agustus 2017



Nomor : 2469 SL.1/PP.00.9/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 29 Agustus 2017

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (Sekertaris)
3. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I (Penguji I)
4. Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.H.I. (Penguji II)
5. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. (Pembimbing I)
6. Dr. Hamsir, M.Hum. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Imma Multazam
N I M : 10300112029
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaran

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Imma Multazam, dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 6 April 1994, Anak ke-Empat (4) dari 7 bersaudara ini merupakan buah cinta dari pernikahan H. Amiruddin Pase dengan Nurnani. Penyusun memulai pendidikan formal dibangku Sekolah Dasar Tello Baru 1/2 pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penyusun melanjutkan pendidikan di

SMP Cokroaminoto Tamalanrea makassar dan tamat pada tahun 2009 dan pada tahun yang sama kemudian penyusun melanjutkan pendidikan ke SMA Cokroaminoto Tamalanrea makassar dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam.

Setelah lulus dari SMA Cokroaminoto Tamalanrea makassar pada tahun 2012 dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri dengan Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum dan adapun pengalaman organisasi yaitu anggota di himpunan mahasiswa islam periode 2012-2013, dan periode 2013-2015 anggota organisasi Dewan Mahasiswa (DEMA), Tahun 2016 penyusun mengajukan judul skripsi **“Peran Penyidik Kepolisian dan KPK dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam”**, guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.